



Jurnal BADATI Ilmu Sosial & Humaniora

Vol 7 No 1 April 2025

P-ISSN : 1907 – 5340

E-ISSN : 2722 - 3248

Hal. : 60 - 85

**PERSEPSI MAHASISWA UKIM TERHADAP
PILPRES 2024
(STUDI KOMPARATIF ANTARA MAHASISWA
FISIP DENGAN MAHASISWA FAKULTAS HUKUM
UKIM)**

**Max Maswekan¹, Eko Basuki², Vesticha Marshanda Tamaela³, Mario
Paulus Tetkiasa⁴**

¹Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Maluku

Email : maswekanmax1963@gmail.com

² Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Maluku

Email : basukieko1745@gmail.com

³Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Maluku

Email : vestichatamaela@gmail.com

⁴Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Kristen Indonesia
Maluku

Email : tetkiasapau@gmail.com

Abstract

The presidential elections held every five years are a democratic process mandated by the Constitution (1945 Constitution), which is elaborated and regulated in Law Number 7 of 2017 on General Elections. Pemilihan presiden yang diadakan setiap lima tahun telah dilaksanakan sebanyak 12 kali sejak kemerdekaan Indonesia. In the 2024 elections, held on February 14, representatives (legislative) as well as the President and Vice President will be elected. This research specifically aims to understand the differences in perceptions among students from three Study Programs (Prodi), namely the Social Welfare and Communication Studies Programs at the Faculty of Social and Political Sciences, and the Law Studies Program at the Faculty of Law, Christian University of Indonesia Maluku (UKIM), regarding the differences in perceptions of the Presidential Election, whether its

implementation is in accordance with the mandate of the law, democratic, of high quality, and whether the political system adopted in Indonesia is suitable and ideal. The method used is a mixed method (qualitative and quantitative) with a comparative approach. The results obtained show significant differences in perception, both quantitatively and qualitatively, among the three study programs.

Keywords: Perception; General Election; President and Vice President; Democracy, Free and Fair.

Abstrak

Pemilihan Presiden (Pilpres) setiap lima tahun sekali adalah proses demokrasi yang dimanatkan oleh Konstitusi (UUD 1945), yang dijabarkan dan diatur dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pilpres yang dilaksanakan lima tahun sekali itu telah dilaksanakan sebanyak 12 kali setelah Indonesia merdeka. Pada pemilu Tahun 2024 dilaksanakan pada 14 Februari untuk memilih wakil-wakil rakyat (legislatif) serta Presiden dan Wakil Presiden. Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk mengetahui perbedaan persepsi mahasiswa tiga Program studi (Prodi), yakni Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik serta Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) terhadap perbedaan persepsi Pemilihan Pilpres, apakah pelaksanaan sesuai amanat undang-undang, demokratis, berkualitas, serta sistem politik yang cocok dan ideal yang dianut di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode campuran atau mixed (kualitatif dan kuantitatif) (mixed methods) dengan pendekatan komparasi (comparative approach). Hasil yang diperoleh terdapat perbedaan persepsi yang signifikan baik secara kuantitatif dan kualitatif dari ketiga Prodi tersebut.

Kata kunci: Persepsi; Pemilihan Umum; Presiden dan Wakil Presiden; Demokrasi, Luber dan Jurdil.

PENDAHULUAN

Pemilihan umum (Pemilu) adalah proses demokrasi di Indonesia yang dilaksanakan setiap lima tahun sekali untuk memilih wakil-wakil rakyat DPR, DPD, DPRD Kabupaten/Kota, dan Presiden/Wakil Presiden, serta Kepala Daerah.

Proses demokrasi lima tahunan ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Pasal 1 poin (1) dikatakan bahwa “Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Dugaan pelanggaran/kecurangan pemilu terutama Pilpres yang dianggap paslon nomor 01 dan 03 terhadap paslon 02 tersebut dipandang sebagai proses pemilu yang melanggar prinsip-prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber & Jurdil) serta tidak demokratis karena dilaksanakan secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), yang berarti mengkhianati demokrasi.

Sebagai negara yang dipandang demokratis ke-3 di dunia, sementara proses pemilu 2024 yang menurut sebagian pengamat diduga terjadi pelanggaran/kecurangan, kemudian melahirkan pertanyaan apakah tidak akan mengakibatkan Indonesia sebagai negara demokratis yang telah diperjuangkan dengan darah dan air mata pada reformasi 1998 kembali merosot menjadi negara “otoriter”, “militeristik”, atau negara “oligarki” ?

Pertanyaan-pertanyaan tersebut yang menjadi fokus keinginan tahu terhadap pandangan atau persepsi mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) dan mahasiswa Fakultas Hukum (FH) Universitas Kristen Indonesia Maluku (UKIM) melalui penelitian ini. Bagaimana perbedaan persepsi mereka terhadap pemilu yang telah dilaksanakan seluruh rakyat Indonesia pada 14 Februari 2024 itu.

Penelitian ini penting karena mahasiswa yang merupakan salah satu elemen masyarakat penting dan strategis, juga sebagai generasi penerus yang akan mewariskan sejarah politik di Indonesia khususnya sejarah demokrasi ke depan, apakah mereka akan mewariskan demokrasi yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, maju, dan berkembang, serta melanjutkan-kannya atau sebaliknya. Karena itu penelitian ini dilakukan untuk mengetahui persepsi atau pandangan mereka terhadap Pemilu 2024 khususnya Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres).

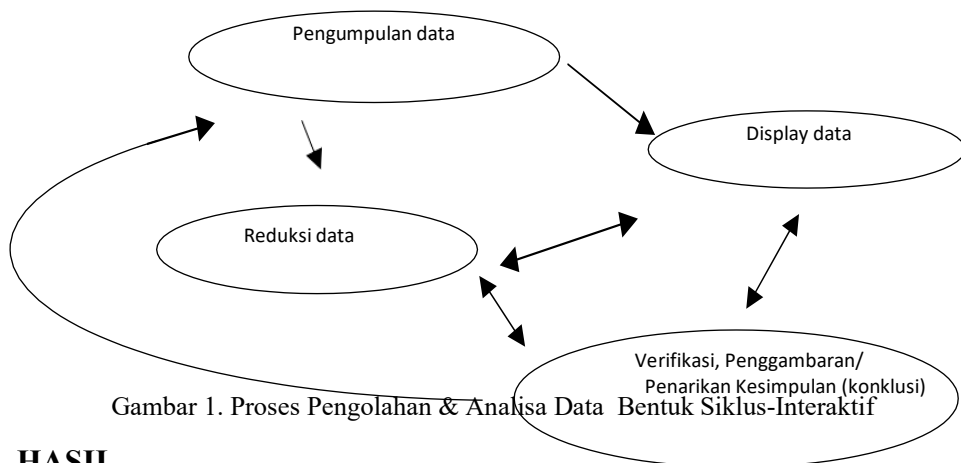
METODE

Penelitian ini menggunakan metode campuran atau mixed (kuantitatif dan kualitatif) (*mixed methods*) dengan pendekatan komparasi (*comparative approach*). Metode kuantitatif digunakan untuk menabulasi data-data/informasi, sedangkan metode kualitatif untuk menjelaskan atau menginterpretasi data-data/informasi secara kuantitatif (persentase) (Tashakkori dan Teddlie, 2010). Sementara pendekatan komparasi digunakan untuk membandingkan perbedaan persepsi ketiga prodi dari kedua fakultas, bagaimana kecenderungan perbedaan persepsi mereka terhadap Pemilu (Pilpres) 2024 tersebut. Lokasi (lokus) penelitian ini dilakukan di Program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP dan Program Studi Ilmu Hukum FH UKIM di Kampus UKIM Jl.OT Pattimaipaww, RT 003/RW 003 Tanah Lapang Kecil

(Talake), Kelurahan Wainitu, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon. Penelitian dilakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan.

Informan penelitian terdiri dari mahasiswa beberapa semester berbeda pada semester ganjil untuk ketiga prodi (IKS, IIKom, dan Ilmu Hukum) masing-masing 12 (dua belas) orang. Jadi total 36 (tiga puluh enam) orang mahasiswa. Dipilih mahasiswa semester tersebut dengan asumsi bahwa mereka telah mengikuti Pemilu (Pilpres) 14 Februari 2024.

Dalam melakukan pengolahan data, dilakukan proses sebagai berikut: setelah data/informasi dikumpulkan, kemudian direduksi, setelah itu display data, terakhir dilakukan penggambaran/ penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2016). Tahapan pengolahan data dilakukan sebagai berikut: 1) Data-data yang telah dikumpulkan di lapangan melalui teknik questioner, kemudian ditabulasi, diolah, dan dianalisis; 2) Setelah itu dibuat dalam bentuk kategori dan disederhanakan (reduksi) serta didistribusikan (display) ke dalam tema-tema pokok kerangka masalah dan tujuan penelitian untuk memudahkan dalam meng-analisis; 3) Setelah data-data/informasi sesuai tema-tema tersebut dikategorisasi, dideskripsikan, kemudian dianalisis/verifikasi serta dijelaskan (secara kualitatif) dengan menggunakan kekuatan penalaran dan logika, kemudian ditarik kesimpulan (konklusi). Proses tersebut divisualkan dengan gambar di bawah.



HASIL

Paparan Data Penelitian

I. Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Kesejahteraan Sosial
Karakteristik Responden

Menyangkut umur responden antara 18-21 tahun ada enam orang atau 50%, antara 22-24 empat orang atau 33,3%, sedangkan umur 25 tahun ke atas dua orang atau 16,7%. Menyangkut semester responden, semester III lima orang atau 41,7%, semester V tujuh orang. Mengenai jenis kelamin responden, baik laki-laki maupun perempuan masing-masing 6 orang atau 50%. Sedangkan agama responden, Kristen Protestan 9 orang atau 75%, Kristen Katolik tiga orang atau 25%. Menyangkut daerah asal responden, dari Ambon 2 orang atau 16,7%, Maluku Tengah satu orang atau 8,33%, Seram Bagian Barat tiga orang atau 25%, Kepulauan Aru dan Buru Selatan masing-masing 1 orang atau 8,33%, sedangkan Kabupaten Kepulauan Tanimbar empat orang atau 33,33%.

II. Fakultas/Prodi : FISIP/Ilmu Komunikasi

Untuk responden dari Program Studi Ilmu Komunikasi, menyangkut umur, antara 18-21 5 orang atau 41,7%, antara 22-24 4 orang atau 33,3%, sedangkan umur 25 tahun ke atas tiga orang atau 25 %. Mengenai semester responden, semester I tiga orang atau 25 %, semester III 5 orang atau 1,7%, sedangkan semester V dan VII masing-masing 16,6%. Mengenai jenis kelamin responden sama seperti Prodi IKS baik laki-laki maupun perempuan masing-masing 6 orang atau 50%. Menyangkut agama yang dianut responden seluruhnya menganut Kristen Protestan, yakni 12 orang atau 100%. Sedangkan mengenai daerah asal responden, yang berasal dari Ambon/Pulau Ambon sebanyak 7 orang atau 58,33%, sementara Maluku Tengah, Seram Bagian Barat, Kepulauan Aru, Buru/Buru Selatan, Maluku Utara, masing-masing 1 orang atau 8,33%.

Fakultas/Prodi : Hukum/Ilmu Hukum

Mengenai umur responden dari Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, antara 18-21 serta antara 22-24 masing-masing 5 orang atau 41,66%, sedangkan umur 25 tahun ke atas dua orang atau 16,66%. Mengenai semester responden, semester III 5 orang atau 41,66%, semester VII ke atas atau semester akhir 7 orang atau 58,33%, sementara semester I dan II tidak ada.

Mengenai jenis kelamin responden rata-rata ketiga program studi juga masing-masing enam orang laki-laki dan 6 orang perempuan atau 50%. Mengenai agama responden, semuanya juga menganut Kristen Protestan, yakni 12 orang atau 100%. Mengenai daerah asal responden, yang berasal dari Ambon/Pulau Ambon tiga orang atau

25%, Maluku Tengah 2 orang atau 16,66%, Maluku Utara 1 orang atau 8,33%, Maluku Barat Daya dua orang atau 16,66%.

Persepsi Mahasiswa Terhadap Pilpres 2024

I. Fakultas/Prodi: FISIP/IKS

Menyangkut Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Apakah Berlangsung Demokratis, Luber & Jurdil, menunjukkan bahwa responden yang menjawab berjalan secara demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (demokratis, luber dan jurdil) sebanyak 3 orang mahasiswa atau 25 %, sementara yang menjawab tidak demokratis, luber dan jurdil sebanyak 6 orang atau 50%, sedangkan yang menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat mereka juga 3 orang atau 25 %. Mengenai Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 berjalan sesuai tidaknya dengan Undang-Undang, menunjukkan responden yang menjawab berjalan sesuai undang-undang sebanyak 4 orang atau 33,33 %, sementara tidak sesuai undang-undang 5 orang atau 41,66 %, sedangkan yang tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka 3 orang atau 25 %.

Berkaitan dengan jawaban responden tentang pelanggaran dan kecurangan Pilpres 2024 menginformasikan bahwa 3 orang atau 25% menjawab tidak ada pelanggaran dan kecurangan, sementara 6 orang atau 50% menjawab ada pelanggaran dan kecurangan, juga 3 orang atau 25% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang ada tidaknya Pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 5 orang atau 41,66 % menjawab ada pelanggaran secara TSM, sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak ada pelanggaran secara TSM, sedangkan 4 orang atau 33,33% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Sedangkan Jawaban Responden Tentang Bentuk Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pilpres 2024, terungkap ada 5 orang atau 41,66% menjawab pelanggaran dan kecurangan dalam bentuk SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) hasil perhitungan suara, sementara 6 orang atau 50% menjawab ada campur tangan Presiden dan penyalahgunaan kekuasaan, serta pemberian sembako atau Bansos, sedangkan hanya 1 orang atau 8,33% tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangannya.

Menyangkut Jawaban Responden Tentang Indikasi Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada indikasi politik uang, sementara dua orang atau 16,66% menjawab tidak ada indikasi politik uang, sedangkan 4 orang atau 33,33% mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Indikasi Pelanggaran Kode Etik oleh KPU dan MK dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa ada 5 orang atau 41,66 % menjawab ada indikasi pelanggaran kode etik, sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak ada indikasi pelanggaran, sedangkan 3 orang atau 25% pula tidak tahu atau tidak berikan pendapat atau pandangan mengenai kasus pelanggaran kode etik tersebut. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Indikasi Intimidasi/Tekanan TNI/POLRI dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa ada 5 orang atau 41,66% menjawab ada indikasi intimidasi/tekanan dari oknum-oknum TNI/POLRI, sementara 4 orang atau 33,33% menjawab tidak ada indikasi intimidasi/ tekanan, sedangkan 3 orang atau 25% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka tentang indikasi intimidasi/tekanan tersebut.

Menyangkut Jawaban Responden Tentang Netralitas PNS/ASN dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 3 orang atau 25% menjawab PNS/ASN netral, sementara 6 orang atau 50% menjawab PNS/ASN menjawab tidak netral, sedangkan 3 orang atau 25% lagi menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Sedangkan mengenai Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 ada tidaknya Keterlibatan Kades/Raja Dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden, terungkap bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada keterlibatan kades/raja dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden, sementara 4 orang 33,33% menjawab tidak ada keterlibatan kades/raja, sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu/memberikan pendapat/pandangan mereka. Sementara terkait dengan Jawaban Responden Tentang Bentuk Keterlibatan kades/raja pada Pilpres 2024 dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wakil Presiden, terungkap bahwa masing-masing 5 orang atau 41,66% menjawab memberikan dukungan dalam bentuk memberikan pernyataan melalui deklarasi maupun menjanjikan kemenangan melalui hasil pemungutan suara, sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Boleh Tidaknya dalam Pilpres 2024 Presiden yang masih aktif Boleh Mencalonkan Anak/Keluarganya, jawaban responden terungkap bahwa 3 orang atau 25% menjawab boleh karena itu adalah hak mereka sebagai warga negara yang mempunyai hak memilih dan dipilih, sementara enam orang atau 50% menjawab tidak boleh karena dalam negara demokrasi hal tersebut dianggap tidak patut atau tidak wajar, atau dianggap melanggar nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Sementara terkait Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Sudahkah Mengalami Kemunduran sehingga Perlu Direformasi (Dirubah), terungkap bahwa 6 orang atau 50% menjawab demokrasi khususnya Pilpres

2024 telah mengalami kemunduran sehingga perlu dievaluasi dan bila perlu direformasi (dirubah), sementara masing-masing tiga orang atau 25% menjawab belum mengalami kemunduran, dan tidak tahu 3 orang atau 25% juga tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangannya.

Terkait Jawaban Responden Tentang Cocok dan Ideal Tidaknya Sistem Multy Party (Banyak Partai) Dalam Sistem Politik di Indonesia, terungkap bahwa 5 orang atau 41,66% menjawab cocok dan ideal dianut di Indonesia, karena menurut mereka Indonesia terdiri dari berbagai latarbelakang suku, golongan, status sosial-ekonomi, serta agama dan etnis, sehingga semua perbedaan tersebut bisa terwakilkan. Sementara 5 orang atau 50% menjawab tidak cocok dan ideal karena akan menimbulkan pemborosan atau tidak efisien dan efektif, serta dapat berpo-tensi menimbulkan gejolak sosial dan perpecahan dalam masyarakat. Sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Mengenai Jawaban Responden Tentang Jumlah Partai Politik yang Cocok dan Ideal dalam Sistem Politik di Indonesia, terlihat bahwa 5 orang atau 41,33 % menjawab dua sampai tiga partai politik cocok dan ideal untuk sistem politik di Indonesia, karena menurut mereka dua sampai tiga partai politik tidak banyak memboroskan dana untuk kegiatan atau aktivitas politik serta tidak banyak menimbulkan ekses negatif dalam masyarakat berupa gesekan-gesekan atau konflik. Dengan kata lain lebih mudah bagi partai politik berkonsentrasi pada kegiatan-kegiatan yang mendidik atau melakukan edukasi (pendidikan politik) yang mencerdaskan masyarakat tentang hak dan kewajiban masyarakat dalam berpolitik. Di samping itu masyarakat akan lebih mengenal dengan baik dan dekat dengan figur-figur partai serta pogram-program yang disampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin sadar dan tercerahkan. Sementara 4 orang atau 33,33% mengatakan empat sampai enam atau lebih partai politik cocok dan ideal untuk sistem politik di Indonesia karena mengingat beragam latarbelakang masyarakat yang majemuk baik dari segi suku, golongan, status sosial-ekonomi, agama dan etnis. Sedangkan 3 orang atau 25% tidak tahu atau memberikan pendapat/ pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Presiden Indonesia sebaiknya dari Latarbelakang Militer atau Sipil, terungkap bahwa 5 orang atau 41,66% mengatakan sebaiknya presiden memiliki latarbelakang militer, mengingat militer memiliki disiplin yang tinggi, tegas, serta berwibawa. Sementara 5 orang atau 41,66% lain menjawab sebaiknya dari latarbelakang sipil, karena sipil memiliki pengalaman di bidang pemerintahan yang cukup sehingga mereka bisa mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/ pandangan mereka.

Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Kualitas Pilpres 2024, terungkap bahwa 3 orang atau 25% menjawab berkualitas, karena menurut mereka Pilpres berjalan lancar dan aman, serta tidak ada gangguan yang terlalu mencolok walaupun ada perbedaan pendapat dan sedikit pertentangan yang kemudian dibawa ke persidangan sampai di Mahkamah Konstitusi (MK). Sedangkan 3 orang atau 25% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Terkait Jawaban Responden Mengenai Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia, terungkap bahwa 2 orang atau 16% menjawab sistem demokrasi liberal cocok dan ideal untuk Indonesia. Demokrasi liberal menurut responden karena individu diberikan atau memiliki kebebasan dalam menjalankan dan menentukan pilihan politik mereka tanpa dipengaruhi siapapun, dan hal itu dilindungi oleh negara melalui konstitusi (undang-undang). Sementara 3 orang atau 25% menjawab sistem demokrasi sosialis cocok dan ideal untuk Indonesia menurut responden kekuasaan dikelola secara kolektif (bersama) walaupun tersentral (terpusat) demi kesejahteraan rakyat banyak (kesejahteraan sosial), walaupun sistem ini menentang kepemilikan dan kebebasan individu. Sementara 6 orang atau 50% menjawab sistem demokrasi Pancasila cocok dan ideal untuk Indonesia karena bangsa dan masyarakat Indonesiakarena memiliki nilai-nilai luhur seperti nilai kekeluargaan, gotong royong, budi pekerti luhur, dan religius atau ketuhanan yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan 1 orang atau 8% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangannya.

II. Fakultas/Prodi: FISIP/ Ilmu Komunikasi

Untuk mahasiswa Prodi Ilmu Komunikasi bagaimana persepsi mereka terkait Pilpres 2024 dapat dikemukakan di bawah, sbb:

Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Berlangsung Demokratis, Luber & Jurdil, terungkap bahwa 4 orang responden atau 33,33%, sementara tidak demokratis, luber dan jurdil 5 orang atau 41,66%, sedangkan 3 orang atau 25% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Sementara terkait dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Berjalan sesuai tidaknya dengan Undang-Undang, terungkap bahwa 4 orang atau 33,33% menjawab telah sesuai dengan undang-undang, sementara 5 orang atau 41,66% menjawab tidak sesuai dengan undang-undang, sedangkan 3 orang atau 25% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka.

Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Pelanggaran dan Kecurangan Pilpres 2024, terungkap bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada pelanggaran dan kecurangan, sementara hanya 2 orang atau 16,66% menjawab tidak terdapat pelanggaran dan kecurangan, sedangkan 4 orang atau 33,33% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang ada tidaknya Pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 5 orang atau 41,66% menjawab ada terjadi pelanggaran secara TSM, sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak ada indikasi terjadi pelanggaran secara TSM. Sedangkan 4 orang atau 33,33% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Bentuk Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 5 orang atau 41,66% menjawab bentuk pelanggaran berkaitan dengan SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) hasil perhitungan suara yang tidak jelas dan tranparan, sementara 5 orang juga atau 41,66% menjawab bentuk pelanggaran berkaitan dengan campur tangan Presiden, penyalahgunaan kekuasaan oleh pejabat yang berwenang, serta pemberian bantuan sosial berupa sembako atau Bansos. Sedangkan 2 orang atau 16,66% tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka.

Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Indikasi Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada indikasi politik uang dalam Pilpres 2024, sementara 4 orang menjawab tidak terdapat indikasi politik uang. Sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka soal politik uang tersebut. Menyangkut Jawaban Responden Tentang Indikasi Pelanggaran Kode Etik oleh KPU dan MK dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada terjadi pelanggaran kode etik yang dilakukan baik oleh KPU maupun MK karena mereka tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik berdasarkan aturan yang telah ditetapkan. Sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak ada indikasi pelanggaran kode etik. Sedangkan tiga orang juga atau 25% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka soal terjadi pelanggaran kode etik tersebut. Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Indikasi Intimidasi/Tekanan TNI/POLRI dalam Pilpres, terungkap bahwa ada 6 orang atau 50% menjawab ada terdapat indikasi intimidasi atau tekanan dari oknum-oknum TNI/POLRI membuat terjadi insiden yang dialami oleh pihak pendukung salahsatu Paslon, sementara 3 orang atau 25%. Sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab

tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka menyangkut indikasi intimidasi atau tekanan TNI/POLRI dalam Pilpres 2024.

Menyangkut Jawaban Responden Tentang Netralitas PNS/ASN dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa 3 orang atau 25% menjawab PNS/ASN netral karena ada aturan yang mengatur tentang para PNS/ASN sebagai pelayan masyarakat yang harus netral, sementara 5 orang atau 41,66% menjawab PNS/ASN tidak netral dalam Pilpres 2024, sedangkan 4 orang atau 33,33% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat atau pandangan mereka terkait indikasi netralitas PNS/ASN.

Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Tentang Keterlibatan Kades/Raja Dalam mendukung Salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden, terlihat bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada keterlibatan kades/raja dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden tertentu karena ada upaya mobilisasi dan arahan dari “atas”, sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak ada keterlibatan kades/raja dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden tertentu karena mereka juga termasuk PNS yang harus netral dan pelayan masyarakat. Sedangkan 3 orang juga atau 25% tidak menjawab atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Menyangkut Jawaban Responden Tentang Bentuk keterlibatan Kades/Raja dalam Pilpres 2024 Presiden/Wkl Presiden, terungkap bahwa 5 orang atau 1,66% menjawab bentuk keterlibatan mereka dalam bentuk memberikan pernyataan dukungan melalui deklarasi, sementara 4 orang atau 33,33% menjawab memberikan dukungan dengan menjanjikan kemenangan melalui hasil pemungutan suara, sedangkan 3 orang atau 25% tidak menjawab atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Terkait Jawaban Responden Tentang Boleh Tidaknya dalam Pilpres 2024 Presiden yang masih aktif Mencalonkan Anak/Keluarganya, terungkap bahwa ada 6 orang atau 50% menjawab tidak boleh karena tidak biasa atau lasim dalam negara demokrasi, sementara 4 orang atau 33,66% menjawab boleh-boleh saja karena dianggap anak atau keluarga sama dengan warga negara lain mempunyai hak yang sama untuk dipilih dan memilih menjadi calon baik presiden maupun wakil presiden, sedangkan 2 orang atau 16,66% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Sudahkah Mengalami Kemunduran sehingga Perlu Direformasi (Dirubaah), tergambar bahwa enam orang atau 50% menjawab telah mengalami kemunduran sehingga perlu dilakukan reformasi atau perubahan dalam demokrasi di Indonesia, sementara empat orang atau 33,66% menjawab belum

mengalami kemunduran sehingga tidak perlu dilakukan reformasi atau perubahan, sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait Jawaban Responden Tentang Cocok dan ideal Tidaknya Sistem Multy Party (Banyak Partai) Dalam Sistem Politik di Indonesia, nampak bahwa masing-masing ada 5 orang atau 41,66% menjawab bahwa cocok dan ideal sistem multy party atau banyak partai, sementara lima orang atau 41,66% yang lain menganggap tidak cocok dan ideal. Sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Jumlah Partai Politik yang Cocok dan Ideal dalam Sistem Politik di Indonesia, tergambar bahwa masing-masing ada 5 orang atau 41,66% menjawab dua sampai tiga partai politik cocok dan ideal untuk Indonesia yang majemuk, sedangkan juga 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait Jawaban Responden Tentang Presiden Indonesia sebaiknya dari Latarbelakang Militer atau Sipil, tergambar bahwa 6 orang atau 50% menjawab sebaiknya dari latarbelakang militer, karena menurut mereka militer telah dibentuk dengan disiplin yang tinggi, tegas dan berwibawa, sementara 5 orang atau 41,66% menjawab sebaiknya presiden memiliki latarbelakang sipil, dengan alasan mereka telah memiliki banyak pengalaman di bidang birokrasi pemerintahan sehingga memiliki kemampuan memimpin dengan baik. Sedangkan hanya 1 atau 8,33% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Kualitas Pilpres 2024, terlihat bahwa ada 3 orang atau 25% menjawab Pilpres berkualitas karena pelaksanaannya berjalan lancar, aman dan baik, sementara 6 orang atau 50% menjawab Pilpres 2024 tidak berkualitas karena banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sedangkan 3 orang juga atau 25% tidak tahu/memberikan pendapat. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia, terlihat bahwa 2 orang atau 16,66% menjawab Sistem Demokrasi Liberal dianggap cocok dan ideal karena secara konstitusi atau undang-undang menjamin warga atau rakyat secara individu memiliki kebebasan dalam menjalankan dan menentukan pilihan politiknya tanpa diintervensi oleh pihak manapun, sementara 2 orang lagi atau 16,66% menjawab sistem demokrasi sosialis dianggap cocok untuk Inonesia karena kekuasaan adalah milik bersama secara kolektif, sedangkan 6 orang atau 50% menjawab Sistem Demokrasi Pancasila sangat cocok dan idel untuk Indonesia karena Pancasila

mengandung nilai-nilai dasar yang digali dari kandungan bangsa Indonesia sendiri, sedangkan ada dua orang juga atau 16,66% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

III. Fakultas/Prodi: Hukum/Ilmu Hukum

Dari mahasiswa Prodi Ilmu Hukum yang mempunyai persepsi terhadap Pilpres 2024, dapat dikemukakan di bawah, sbb :

Menyangkut dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Berlangsung Demokratis, Luber & Jurdil, terungkap bahwa sebanyak 3 orang atau 25% menjawab pelaksanaan Pilres berjalan demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil), karena pelaksana-naannya berjalan lancar, aman dan damai, sementara 6 orang atau 50% menjawab pelaksanaan Pilpres tidak berjalan demokratis, luber dan jurdil, karena banyak masalah yang terjadi baik pelanggaran maupun kecurangan, secara teknis maupun pelanggaran terhadap undang-undang, sedangkan juga 3 orang atau 25% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Berjalan Sesuai Tidaknya dengan Undang-Undang, di mana 3 orang atau 25% menjawab sesuai dengan undang-undang karena pelaksanaan Pilpres berjalan lancar, aman dan tertib, sementara 5 orang atau 41,66% menjawab pelaksanaan Pilpres berjalan tidak sesuai dengan undang-undang yang berlaku karena banyak pelanggaran maupun kecurangan, sedangkan 4 orang atau 33,33% tidak tahu atau memberikan pendapat.

Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pilpres 2024, terungkap ada 6 orang atau 50% menjawab ada pelanggaran dan kecurangan dalam pelaksanaan yang diduga dilakukan oleh pihak penyelenggara serta kurang tegas dan ketatnya pengawasan dari pihak Bawaslu, sementara 2 orang atau 16,66% menjawab tidak ada pelanggaran dan kecurangan. Sedangkan 4 orang atau 33,33% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/ pandangan mereka. Mengenai Jawaban Responden Tentang ada tidaknya Pelanggaran TSM dalam Pilpres 2024, tergambar bahwa 7 orang atau 58,33% menjawab ada pelanggaran secara TSM, sementara 3 orang atau 25% orang menjawab tidak ada pelanggaran secara TSM, sedangkan 2 orang atau 16,6% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait Jawaban Responden Tentang Bentuk Pelanggaran dan Kecurangan dalam Pilpres 2024, terungkap 5 orang atau 41,66% menjawab

pelanggaran dalam bentuk SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) hasil perhitungan suara yang tidak kredibel dan transparan yang diselenggarakan oleh pihak KPU, sementara 6 orang atau 50% menjawab pelanggaran dalam bentuk campur tangan Presiden dengan kekuasaan yang dimiliki serta sumberdaya yang ada, juga bantuan sembako (Bansos) yang tidak tepat waktu serta dilakukan oleh instansi yang tidak memiliki tugas dan kewenangan sesuai tupoksinya (tugas dan fungsi). Sedangkan hanya 1 orang atau 8,33% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/ pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Indikasi Politik Uang (*Money Politic*) dalam Pilpres 2024, terungkap bahwa ada 6 orang atau 50% menjawab ada indikasi politik uang yang dilakukan oleh pihak-pihak dari Paslon tertentu untuk meraih sebanyak mungkin suara untuk memenangkan Paslonnya, sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak terdapat indikasi politik uang karena kurang didukung dengan bukti-bukti yang autentik (sah), sedangkan 3 orang juga atau 25% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Terkait Jawaban Responden Tentang Indikasi Pelanggaran Kode Etik oleh KPU dan MK dalam Pilpres 2024, terlihat bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada pelanggaran kode etik baik oleh KPU maupun MK, yang menurut mereka terbukti secara sah dan meyakinkan oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), sedangkan masing-masing 3 orang atau 25% menjawab tidak ada pelanggaran kode etik, dan juga 3 orang atau 25% tidak tahu atau memberikan pendapat/ pandangan mereka.

Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Indikasi Intimidasi/ Tekanan TNI/POLRI dalam Pilpres 2024, terlihat 5 orang atau 41,66% menjawab ada indikasi intimidasi atau tekanan dari oknum-oknum TNI/POLRI yang menggunakan otoritas atas nama instansinya melakukan intimidasi atau tekanan membuat warga pemilih menggunakan hak politiknya di bawah tekanan yang kemungkinan bertentangan dengan hati nurani mereka. Sementara 4 orang atau 33,33% menjawab tidak ada indikasi intimidasi atau tekanan dari oknum-oknum TNI/POLRI mengatasnamakan instansi untuk melakukan intimidasi kepada warga pemilih dalam menggunakan hak mereka dalam memilih Paslon tertentu. Sedangkan 3 orang atau 25% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait Jawaban Responden Tentang Netralitas PNS/ASN dalam Pilpres 2024, terlihat bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada indikasi PNS/ASN tidak netral dalam Pilpres 2024 karena dimobilisasi dan diarahkan dalam memilih Paslon tertentu dari atasan mereka disertai sangsi-sangsi tertentu, sementara 4 orang atau 33,33% menjawab PNS/ASN netral dalam

memilih Paslon tertentu karena mereka diatur oleh undang-undang sebagai pegawai negeri sipil yang harus melayani masyarakat dalam menjalankan tugasnya sebagai abdi negara dan masyarakat. Sedangkan 2 orang atau 16,6% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Terkait Jawaban Responden Tentang Keterlibatan Kades/Raja pada Pilpres 2024 dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden, terlihat bahwa 6 orang atau 50% menjawab ada indikasi keterlibatan kades atau raja di Ambon/ Maluku dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden tertentu, sementara 3 orang atau 25% menjawab tidak ada indikasi keterlibatan kades/raja dalam mendukung salahsatu Paslon presiden/wkl presiden. Sedangkan 3 orang juga atau 25% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Bentuk Keterlibatan Kades/Raja dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/ Wkl Presiden pada Pilpres 2024, terungkap bahwa 5 orang atau 41,66% menjawab memberikan dukungan dalam bentuk pernyataan melalui deklarasi, sementara 6 orang atau 50% menjawab mendukung dalam bentuk kemenangan melalui hasil pemungutan suara. Sedangkan hanya 1 orang atau 8,33% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Terkait Jawaban Responden Tentang Boleh Tidaknya Presiden yang masih aktif mencalonkan anak/keluarganya pada Pilpres 2024, terlihat bahwa 3 orang atau 25% menjawab boleh saja mencalonkan karena mereka sebagai warga negara lain juga mempunyai hak yang sama untuk dicalonkan, sementara 6 orang atau 50% menjawab tidak boleh dengan alasan dalam negara demokrasi tidak pantas jika presiden yang masih aktif menjabat mencalonkan anak atau keluarganya sebagai presiden atau wakil presiden, sedangkan 3 orang juga atau 25% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Berkaitan dengan Jawaban Responden Tentang Pilpres 2024 Sudahkah Mengalami Kemunduran sehingga Perlu Direformasi (Dirubah), terlihat bahwa 6 orang atau 50% menjawab telah mengalami kemunduran sehingga perlu direformasi karena banyak masalah terutama menyangkut pelanggaran terhadap undang-undang yang dirubah sewenang-wenang oleh pemegang kekuasaan, sementara 3 orang atau 25% menjawab belum mengalami kemunduran dengan alasan Pilpres berjalan lancar dan aman dan terkendali tanpa hambatan yang berarti, sedangkan 3 orang juga atau 25% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Menyangkut Jawaban Responden Tentang Cocok dan Ideal Tidaknya Sistem Multy Party (Banyak Partai) dalam Sistem Politik di Indonesia, terlihat di mana 6 orang atau 50% menjawab cocok dan ideal, sementara ada 3 orang atau 25% menjawab tiak cocok dan ideal. Sedangkan 3 orang

juga atau 25% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/panangan mereka.

Terkait Jawaban Responden Tentang Jumlah Partai Politik yang Cocok dan Ideal dalam Sistem Politik di Indonesia, terlihat 5 orang atau 41,66% menjawab dua sampai tiga partai politik dianggap cocok dan ideal dalam Sistem Politik di Indonesia, sementara 6 orang atau 50% menjawab empat sampai enam partai politik dianggap cocok dan ideal dalam Sistem Politik di Indonesia. Sedangkan hanya 1 atau 8,33% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangannya. Menyangkut Jawaban Responden Tentang Presiden Indonesia sebaiknya dari Latarbelakang Militer atau Sipil, di mana terlihat bahwa 4 orang atau 33,33% menjawab sebaiknya dari latarbelakang militer karena militer memiliki disiplin yang tinggi serta sebagai penjaga persatuan dan kesatuan bangsa, sementara 6 orang atau 50% menjawab sebaiknya presiden dari latar-belakang sipil. Sedangkan 2 orang atau 16,66% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Mengenai Jawaban Responden Tentang Kualitas Pilpres 2024, tergambar bahwa 3 orang atau 25% menjawab pelaksanaan demokrasi khususnya Pilpres menjawab berkualitas, sementara 6 orang atau 50% menjawab tidak berkualitas. Sedangkan 3 orang juga atau 25% menjawab tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Terkait dengan Jawaban Responden Tentang Sistem Demokrasi yang Cocok dan Ideal untuk Indonesia, terlihat bahwa 3 orang atau 25% menjawab Sistem Demokrasi Liberal cocok dan ideal untuk Indonesia, sementara 2 orang atau 16,66% menjawab Sistem Demokrasi Sosialis cocok dan ideal untuk Indonesia. Sedangkan 6 orang atau 50% menjawab Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia adalah Sistem Demokrasi. Hanya 1 orang atau 8,33% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangannya.

PEMBAHASAN

Dari paparan data persentase (kuantitatif) mengenai pelaksanaan Pilpres pada 12 Februari 2024 di atas, dapat dibahas variabel-variabel penelitian dari ketiga Program Studi (Prodi) terkait persepsi mereka di bawah, sbb :

Berkaitan dengan apakah pelaksanaan Pilpres 2024 berlangsung demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil) tergambar bahwa persepsi/pandangan mahasiswa ketiga Prodi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Ilmu Komunikasi FISIP, Ilmu Hukum Fakultas Hukum UKIM, menunjukkan bahwa rata-rata jawaban mereka tentang pelaksanaan

secara kuantitatif berkisar antara 25% sampai 33,33%. Artinya secara kualitatif Pilpres menurut mereka berjalan demokratis, dengan alasan bahwa pelaksanaannya berjalan lancar, aman, tertib dan terkendali tanpa menimbulkan gejolak yang berarti, walaupun ada pihak-pihak yang merasa keberatan karena banyak terjadi kecurangan dan pelanggaran sampai berakhir di pengadilan Mahkamah Konstitusi (MK). Namun antara 41,66% sampai 50% menjawab pelaksanaan Pilpres berjalan tidak demokratis.

Artinya secara kualitatif demokrasi khususnya Pilpres memiliki kualitas yang kurang baik karena banyak masalah yang terjadi berupa pelanggaran dan kecurangan baik oleh pihak penyelenggara yakni KPU dan Bawaslu yang mengawasi pelaksanaan Pilpres tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik dan benar. Bahkan MK yang merupakan penjaga konstitusi saja melanggar undang-undang sehingga ketua MK harus dicopot dan diberkentikan dari jabatannya. Berkaitan dengan jawaban responden tentang pelaksanaan Pilpres berjalan sesuai dengan undang-undang atau tidak, dari ketiga Prodi secara kuantitatif menjawab sesuai dengan undang-undang berkisar antara 25% sampai 33,33%, artinya secara kualitatif bagi mereka pelaksanaan Pilpres berhasil dengan baik tanpa hambatan yang berarti karena para penyelenggara maupun pihak keamanan telah melaksanakan tugas mereka sesuai undang-undang yang berlaku, sementara rata-rata 41% menjawab tidak sesuai dengan undang-undang karena banyak masalah pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan penyelenggara maupun pihak keamanan yang terkesan berpihak pada salah satu Paslon tertentu. Sedangkan 25% sampai 33,33% menjawab mereka tidak tahu atau tidak punya pendapat/pandangan mengenai hal tersebut. Berkaitan dengan jawaban responden tentang pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pilpres 2024, jawaban ketiga Prodi tersebut secara kuantitatif antara 16,66% sampai 25% mengatakan tidak ada pelanggaran, artinya secara kualitatif argumentasi mereka jika ada pelanggaran berarti pelaksanaan Pilpres tidak berhasil dan sukses. Bagi mereka mungkin saja ada pelanggaran dan kecurangan namun tidak terjadi di semua daerah dan tidak dapat dibuktikan berdasarkan fakta persidangan. Sementara rata-rata 50% menjawab ada pelanggaran dan kecurangan karena pihak penyelenggara baik KPU maupun Bawaslu serta pihak keamanan nampaknya tidak menjalankan tugas dan fungsi mereka dengan baik dan benar.

Bagi mereka banyak indikasi pelanggaran dan kecurangan yang dilaporkan namun pihak Bawaslu tidak menggubris malah terkesan mengabaikan laporan dugaan pelanggaran dan kecurangan, sehingga dugaan itu terpaksa dibawa ke MK. Di samping itu ada sekitar 25% sampai 33,33% tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Sementara

berkaitan dengan jawaban responden tentang ada tidaknya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, dan massif (TSM), tergambar bahwa secara kuantitatif ketiga Prodi rata-rata 41,66% mengatakan ada pelanggaran secara TSM, artinya secara kualitatif bagi mereka karena terjadi hampir sama pola pelanggarannya di hampir semua daerah yang dibuktikan dengan kasus-kasus dan fakta-fakta di persidangan MK walaupun ditolak dan disangkal oleh Majelis MK, tetapi ada “dissenting opinion” dari beberapa anggota MK yang menunjukkan di antara anggota MK memiliki pandangan yang berbeda tentang kasus-kasus pelanggaran secara TSM. Sementara rata-rata 25% menjawab tidak ada pelanggaran dalam Pilpres secara TSM, artinya secara kualitatif pandangan mereka sedikit berbeda dari responden yang mengatakan ada pelanggaran secara TSM. Perbedaan ini tentu disebabkan karena cara pandang maupun pengetahuan mereka dalam mengikuti perkembangan proses Pilpres yang berlangsung secara nasional. Hanya ada 33,33% responden yang tidak tahu atau memberikan pendapat atau pandangan mereka. Berkaitan dengan bentuk pelanggaran dan kecurangan dalam Pilpres 2024 rata-rata ketiga Prodi secara kuantitatif menjawab antara 41,66% sampai 50% mengatakan ada berbagai bentuk pelanggaran mulai soal SIREKAP (Sistem Informasi Rekapitulasi) hasil perolehan suara, penyalahgunaan kekuasaan, sampai pemberian bahan sembako atau Bansos.

Artinya secara kualitatif dapat dikatakan bahwa secara argumentatif berdasarkan fakta-fakta persidangan kemungkinan besar terjadi berbagai bentuk pelanggaran dalam Pilpres 2024. Hanya ada 8,33% responden yang mengatakan tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan jawaban responden mengenai dugaan indikasi politik uang (*money politic*) oleh ketiga Prodi secara kuantitatif rata-rata 50% mengatakan terdapat politik uang dalam Pilpres 2024, artinya secara kualitatif persentase yang cukup tinggi tersebut menunjukkan Pilpres 2024 dibayangi dengan permainan yang kurang fair (adil) dan tidak jujur, serta tidak elegan. Hanya 16% sampai 33,33% responden mengatakan tidak ada indikasi politik uang, artinya secara kualitatif penilaian dan pengetahuan responden berbeda dalam mengikuti proses Pilpres 2024. Di samping itu ada sekitar 16,66% menjawab tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Sementara berkaitan dengan dugaan indikasi pelanggaran kode etik oleh KPU dan MK dalam Pilpres oleh responden ketiga Prodi rata-rata secara kuantitatif mengatakan antara 41,66% sampai 50% ada indikasi pelanggaran kode etik oleh KPU dan MK, artinya secara kualitatif ada indikasi kuat terjadi pelanggaran kode etik oleh KPU maupun MK, sementara responden lain rata-rata 25% mengatakan tidak ada pelanggaran kode etik oleh KPU maupun MK, artinya secara kualitatif

argumentasi mereka kurang kuat diban-dingkan dengan teman-teman responden yang lain. Sedangkan rata-rata 25% teman responden lain tidak tahu atau tidak memberikan pendapat atau pandangan mereka mengenai pelanggaran kode etik oleh KPU maupun MK.

Berkaitan dengan jawaban responden tentang indikasi intimidasi atau tekanan dari pihak oknum-oknum aparat keamanan terutama TNI/POLRI rata-rata secara kuantitatif antara 41,66% sampai 50% mengatakan ada indikasi intimidasi atau tekanan dari pihak oknum-oknum TNI/POLRI, artinya secara kualitatif pelaksanaan Pilpres dalam negara yang demokratis hal-hal tersebut tidak boleh terjadi. Sementara antara 25% sampai 33,33% responden mengatakan tidak ada indikasi intimidasi atau tekanan dari oknum-oknum TNI/POLRI. Sedangkan ada juga responden rata-rata antara 16% sampai 25% responden mengatakan tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Sementara jawaban responden mengenai netralitas PNS/ASN dalam Pilpres 2024 secara kuantitatif oleh responden ketiga Prodi menjawab rata-rata 41,66% sampai 50% mengatakan PNS/ASN tidak netral dalam Pilpres 2024, artinya secara kualitatif ada indikasi kuat para PNS/ASN dimobilisasi dan diarahkan untuk memilih salahsatu Paslon Presiden/Wakil Presiden tertentu dari “atasan”, padahal ada undang-undang atau aturan yang melarang PNS/ASN tidak boleh terlibat dalam politik praktis karena mereka adalah pelayan masyarakat yang berdiri di atas semua golongan masyarakat dan partai politik. Sementara 33,33% sampai 25% responden mengatakan PNS/ASN netral dalam Pilpres 2024. Tentu secara kualitatif perbedaan kuantifikasi ini dipengaruhi oleh perbedaan penilaian dan pengalaman responden dalam menilai dan mengikuti proses Pilpres secara baik dan serius. Sedangkan 16,66% sampai 33,33% responden tidak tahu atau memberikan pandangan atau pendapat mereka terkait netralitas PNS/ASN tersebut. Berkaitan dengan jawaban responden mengenai keterlibatan para Kades/Raja dalam Pilpres 2024 secara nasional dan secara khusus di Ambon/ Maluku, rata-rata secara kuantitatif 50% mengatakan para kades/raja terlibat mendukung salahsatu Paslon Pilpres/ Wkl Pilpres, artinya secara kualitatif ada indikasi para kades/raja turut terlibat dalam mendukung salahsatu Paslon Pilpres/Wkl Pilpres karena dimobilisasi dan arahan dari “atas” disertai “sanksi” tertentu. Sementara 25% sampai 33,33% responden mengatakan para kades/raja tidak ada indikasi terlibat mendukung salahsatu Paslon Pilpres/Wkl Pilpres tertentu. Sedangkan 16% sampai 25% responden mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

Terkait dengan bentuk keterlibatan para kades/raja dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden/Wkl Presiden, secara kuantitatif rata-

rata 41,66% responden mengatakan keterlibatan kades/raja dalam bentuk memberikan pernyataan dukungan melalui deklarasi, sementara 33,33% sampai 50% responden memberikan dukungan dalam bentuk menjanjikan kemenangan melalui hasil pemungutan suara. Sedangkan 8,33% sampai 25% responden mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pendangan mereka. Dalam kaitannya dengan jawaban responden mengenai boleh tidaknya Presiden yang masih aktif menjabat mencalonkan anak atau keluarganya sebagai calon Presiden atau Wakil Presiden secara kuantitatif antara 33,33% sampai 25% mengatakan boleh saja men-calonkan, artinya secara kualitatif sebagai warga negara mereka juga mempunyai hak untuk dicalonkan, sementara rata-rata 50% responden mengatakan tidak boleh Presiden yang masih aktif menjabat mencalonkan anak atau keluarganya, karena secara kualitatif menurut pandangan mereka dalam negara demokratis tidak pantas karena akan mengarah kepada negara oligarki yang hanya segelincir orang yang menguasai kekuasaan/potitik dan ekonomi dan tidak memberikan ruang dan kesempatan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam sektor-sektor publik baik di bidang politik maupun ekonomi. Sedangkan 16% sampai 25% responden mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka mengenai masalah tersebut. Berkaitan dengan jawaban responden mengenai indikasi kemunduraan demokrasi khususnya Pilpres 2024, secara kuantitatif rata-rata 50% responden mengatakan telah mengalami kemunduran sehingga perlu direformasi atau dirubah, karena secara kualitatif bagi responden banyak masalah pelanggaran yang menurunkan derajat demokrasi di Indonesia yang telah diperjuangkan dan dicapai dengan susah payah, dengan darah dan air mata pada tahun 1998 yang menelan korban jiwa anak bangsa. Sementara 25% sampai 33,33% responden mengatakan belum ada indikasi kemunduran demokrasi karena secara kualitatif bagi responden dapat diukur dari pelaksanaan Pilpres berjalan lancar, aman, dan terkendali serta sukses walaupun ada pihak-pihak yang tidak keberatan. Sedangkan 16,33% sampai 25% responden mengatakan tidak tahu atau mengemukakan pendapat/pandangan mereka. Dalam kaitan dengan jawaban responden mengenai cocok tidaknya Sistem Multy Party (banyak partai) dalam sistem politik di Indonesia, secara kuantitatif antara 41,66% sampai 50% mengatakan sistem banyak partai cocok dan ideal di Indonesia, artinya secara kualitatif pandangan mereka dengan sistem banyak partai cocok dan ideal karena Indonesia memiliki latarbelakang yang beragam baik dari segi suku, budaya, daerah, etnik, dan agama, sehingga harus ada keter-wakilan dari berbagai latarbelakang keragaman tersebut.

Sementara ada antara 25% sampai 41,66% mengatakan tidak cocok dan ideal dalam sistem politik di Indonsia, karena secara kualitatif

bagi mereka dengan banyak partai politik akan menyebabkan pemborosan, tidak efisien dan efektif, serta akan menimbulkan banyak masalah dalam masyarakat yang menimbulkan cost (biaya) yang mahal, seperti dapat menimbulkan konflik dan perpecahan dalam masyarakat. Sedangkan 16% sampai 25% mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Dalam kaitannya dengan jawaban responden tentang jumlah partai politik yang cocok dan ideal dalam sistem politik di Indonesia, secara kuantitatif rata-rata 41,66% mengatakan cocok dan ideal dalam sistem politik di Indonesia, artinya secara kualitatif menurut mereka dengan dua sampai tiga partai saja tidak akan menimbulkan pemborosan dan lebih mudah partai politik menjalankan kegiatan atau aktivitas politik dalam memperkenalkan program-program kerja partai kepada rakyat serta lebih mudah mensosialisasikan figur-figur partai kepada masyarakat, sehingga upaya pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan rakyat dapat terwujud. Sementara 16,66% sampai 50% mengatakan sebaiknya antara empat sampai enam partai politik cocok dan ideal dalam sistem politik di Indonesia. Artinya secara kualitatif asumsi mereka dengan jumlah partai antara empat sampai enam partai politik ada keseimbangan antara efisiensi dan efektif serta keterwakilan berbagai golongan dan kepentingan masyarakat sehingga proses politik berjalan dinamis dan berimbang antara efisiensi dan efektivitas partai politik dalam pembangunan politik dan demokrasi serta pembangunan pada umumnya, dan rakyat turut serta memiliki kesadaran dan motivasi dalam perpolitikan yang semakin baik menuju demokrasi yang lebih maju dan berkembang (modern).

Sedangkan 8,33% sampai 25% mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan jawaban responden tentang sebaiknya Presiden dari latarbelakang militer atau sipil secara kuantitatif menjawab antara 33,33% sampai 50% mengatakan sebaiknya dari latarbelakang militer, dengan alasan secara kualitatif militer memiliki disiplin yang cukup tinggi, tegas, sehingga mampu menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat dari paham-paham yang bertentangan dengan ideologi Pancasila yang dapat memecahbelahkan masyarakat dan bangsa. Sementara 41,66% sampai 50% secara kuantitatif mengatakan sebaiknya presiden dari latar-belakang sipil, dengan alasan secara kualitatif sipil memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup dalam pemerintahan dan birokrasi sehingga mampu menjalankan roda pemerintahan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*good government*) serta merit system dan birokrat yang memiliki kredibilitas dan kapabilitas dalam melaksanakan tugas-tugas ketatapamongan yang baik. Sedangkan 8,33% sampai 16,66% mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/ pandangan mereka. Berkaitan dengan jawaban responden tentang kualitas demokrasi khususnya Pilpres, terlihat

dari jawaban responden berikut. Secara kuantitatif rata-rata 25% responden mengatakan berkualitas dengan alasan bahwa pelaksanaan Pilpres berjalan aman, damai, tertib, dan terkendali, yang berarti Pilpres berhasil dan sukses karena penyelenggara (KPU) maupun Bawaslu serta pihak aparat keamanan melaksanakan tugas dan fungsi mereka secara baik dan bertanggungjawab walaupun terdapat kekurangan dan kelemahan. Sementara sebaliknya 50% mengatakan Pilpres tidak berkualitas karena banyak sekali masalah yang diduga ada indikasi pelanggaran dan kecurangan, baik secara teknis maupun penyelewengan terhadap undang-undang yang berakhir di MK yang mengakibatkan ketua MK dicopot dari jabatannya, serta menyusul kemudian ketua KPU dipecat oleh presiden dari jabatannya berdasarkan usul dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena pelanggaran “moral”. Sedangkan rata-rata 25% mengatakan tidak tahu atau tidak memberikan pendapat/pandangan mereka. Berkaitan dengan jawaban responden tentang Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia tergambar berikut ini.

Dari responden ketiga Prodi, rata-rata 16,66% sampai 25% mengatakan Sistem Demokrasi Liberal cocok dan ideal untuk Indonesia dengan argumentasi bahwa rakyat secara individu memiliki kebebasan dalam menjalankan dan menentukan pilihan-pilihan politiknya sendiri dan dilindungi oleh konstitusi dan undang-undang. Sementara 16,66% sampai 25% lainnya juga mengatakan bahwa Sistem Demokrasi Sosialis cocok dan ideal untuk Indonesia karena bagi mereka kekuasaan dimiliki dan dikelola secara kolektif walaupun terpusat/tersentral, namun tujuannya untuk mensejahterakan seluruh masyarakat, dan semua masyarakat memiliki ruang dan peluang yang sama berpartisipasi dalam proses politik, serta kepemilikan tidak diperbolehkan didominasi oleh individu. Sedangkan rata-rata 41,66% sampai 50% mengatakan Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia adalah Sistem Demokrasi Pancasila karena menurut mereka Sistem Demokrasi Pancasila mengandung nilai-nilai luhur seperti nilai-nilai kekeluargaan, gotong royong, budi pekerti luhur, dan religius atau ketuhanan yang merupakan kepribadian bangsa Indonesia. Sedangkan rata-rata 8,33% sampai 16,66% mengatakan tidak tahu atau memberikan pendapat/pandangan mereka.

KESIMPULAN

Dari paparan data dan analisis terhadap Persepsi (Pandangan) Mahasiswa Ketiga Program Studi dari dua Fakultas Terhadap Pilpres 2024, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Antara ketiga Program Studi, yakni program Studi Ilmu Kesejahteraan Sosial, Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP UKIM, dan Program Studi Ilmu Hukum Takultas Hukum UKIM, berkaitan dengan persepsi atau pandangan mereka terhadap Pilpres 2024, nampak secara kuantitatif maupun kualitatif ada perbedaan persepsi yang cukup signifikan terutama mengenai penyelenggara baik KPU, Bawaslu, maupun MK dan Aparatur (TNI/POLRI), PNS/ASN, dan Kades/Raja, termasuk pandangan tentang jumlah dan Sistem Politik di Indonesia, tergambar bahwa pelaksanaan Pilres tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik dan bertanggungjawab karena diduga ada indikasi banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan, sehingga harus dibawa ke persidangan Mahkamah Konstitusi.
2. Ketiga mahasiswa Program Studi dalam pandangan mereka, menilai bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 cenderung berjalan tidak demokratis, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (Luber dan Jurdil).
3. Ketiga Program Studi juga memandang bahwa ada indikasi pelanggaran terhadap konstitusi dan undang-undang oleh KPU maupun Mahkamah Kostitusi (MK) yang dinilai melanggar kode etik, sehingga ketua harus dicopot dari jabatannya oleh MKMK (Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi), maupun ketua KPU kemudian diberhentikan dengan tidak hormat oleh Presiden berdasarkan usul dari DKPP (Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu) karena pelanggaran “moral”.
4. Mahasiswa ketiga Prodi dalam pandangan mereka juga, menilai bahwa pihak TNI/POLRI (dalam hal ini oknum-oknum tertentu) dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya ada indikasi melakukan tindakan intimidasi atau tekanan dalam proses pelaksanaan Pilpres 2024.
5. Mahasiswa ketiga Prodi dalam pandangan mereka juga menilai ada indikasi para PNS/ASN tidak netral dan terkesan dimobilisasi dan diarahkan oleh “atasan” mereka terhadap salahsatu Paslon Presiden dan Wakil Presiden.
6. Mahasiswa ketiga Prodi juga menilai ada keterlibatan para Kepala Desa (Kades) atau Raja baik secara umum maupun secara khususnya di Ambon/Maluku dalam mendukung salahsatu Paslon Presiden dan Wakil Presiden.

7. Mahasiswa ketiga Prodi juga dalam pandangan mereka menilai bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 kurang berkualitas karena diduga banyak terjadi masalah khususnya pelanggaran dan kecurangan yang menyebabkan terjadi sengketa di peradilaan Mahkamah Konstitusi.
8. Dalam pandangan mahasiswa ketiga Prodi juga ada perbedaan terhadap Sistem Multi Party (Banyak Partai) maupun jumlah Partai Politik di Indonesia
9. Mahasiswa ketiga Prodi juga dalam pandangannya menilai bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 kurang berkualitas yang mengakibatkan demokrasi di Indonesia mengalami kemerosotan atau kemunduran sehingga perlu direformasi agar tidak kembali kepada otarianisme dan oligarkhi.
10. Mahasiswa ketiga Prodi juga memandang bahwa Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia, nampaknya ada perbedaan antara Sistem Demokrasi Liberal, Sistem Demokrasi Sosialis, dan Sistem Demokrasi Pancasila. Nampaknya secara kuantitatif maupun kualitatif kecenderungan untuk menilai Sistem Demokrasi yang cocok dan ideal untuk Indonesia ialah Sistem Demokrasi Pancasila karena mengandung nilai-nilai gotong royong, kebersamaan, dan kekeluargaan yang merupakan warisan nilai-nilai luhur bangsa serta kepribadian bangsa Indonesia sendiri.

Akhirnya, secara hipotetis, hasil penelitian ini membuktikan bahwa pelaksanaan Pilpres 2024 baik secara kuantitatif maupun kualitatif, kecenderungan tidak demokratis lebih besar/tinggi daripada yang kurang demokratis, dan demokratis. Artinya hipotesa yang diajukan teruji dalam penelitian ini walaupun pengujiannya (secara statistik) sederhana, yakni hanya dengan meng-gunakan kecenderungan persentase

REFERENSI

Alfian, 1980. *Pemikiran Dan Perubahan Politik Indonesia*. Gramedia, Jakarta.

Almond A. Gabriel and, Verba, Sidney, 1980. *The sivic Culture Revisited*. Boston Mass: Littlen Brawn and Company.

Achmad Edi, Subiayanto. Pemilihan Umum Serentak yang Berintegritas sebagai Pembaruan Demokrasi Indonesia. Jurnal Konstitusi, Volume 17, No.2, Juni 2020. Diakses 26 Mei 2024.

Budiardjo, Miriam, 2008. Dasar-Dasar Ilmu Politik, Gramedia, Jakarta.

Bachtiar, Faradhiba. Rahma. Pemilu Indonesia : Kiblat Negara Demokrasi Dari Berbagai Representasi. Jurnal Politik Profetik, Volume 3, No 1, Tahun 2014. Diakses 26 Mei 2024.

Creswell, John, 2014. Research Design, pendekatan kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed (edisi ketiga), Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____. Penelitian Kualitatif & Desain Riset : Memilih Di Antara Lima Pendekatan (Edisi 3). Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Denzin, Norman K & Lincoln, Yvonna, 2009. Handbook of Qualitative Research (Penerj) Dariyanto dkk, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Faisal, Sanafiah, 1992. Format-Format Penelitian Sosial, Rajawali Pers, Jakarta.

Gaffar, Jandjri M. Demokrasi Kostitusional : Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Konpress, Jakarta.

Kantraprawira, Rusadi, 1988 (Cet Kedua). Sistem Politik Indonesia, Sinar Baru, Bandung.

Moleong, Lexy J, 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif (Cet.27) Rosdakarya, Bndung.

Neuman, W. Lawrence, 1991. Social Research Methods, Kualitatif and Quantitative Approaches (Fourth Edition), Alyn & Bacon, Boston, London, Toronto, Sydney, Tokyo, Singapore.

_____, 2000. Metodologi Penelitian Sosial : Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Indeks, Jakarta.

Sugiyono, 2016. Meode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R % D, Alfabeta, bandung.

Sanit, Arbi, 1989. Mahasiswa, Kekuasaan Dan Bangsa. Lingkaran Studi Indonesia dan Yayasan LBH Indonesia, Jakarta.

Setiardja, Gunawan, 1993. Hak-Hak Asasi Manusia Berdasarkan Ideologi Pancasila, Kanisius, Yogyakarta.

Tashakkori, Abbas dan Tedlie, Charles, 2010. Mixed Methodology : Mengkombinasikan Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1917 Tentang Pemilihan Umum.

Zuhro, R. Siti. Dekokrasi dan Pemilu Indonesia. 2019. Jurnal Penelitian Politik, Vol.16, No.1 (2019). Diakses 24 Mei 2024.